

**SKRIPSI**

**ANALISIS UPAYA SHINZO ABE DALAM MENDORONG KESETARAAN  
GENDER DI JEPANG MELALUI *WOMENOMICS***



**NALVITA**

**NIM : F0220312**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS UPAYA SHINZO ABE DALAM MENDORONG  
KESETARAAN GENDER DI JEPANG MELALUI *WOMENOMIC*

NAMA : NALVITA

NIM : F0220312

PRODI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Majene, 31 Oktober 2024

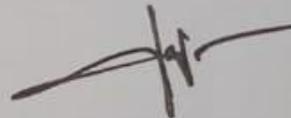
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP., M.A  
NIP. 198807132015042005

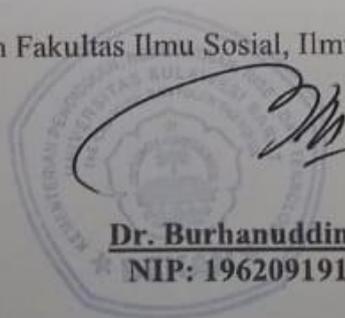
Pembimbing II



Muhammad Sajidin, S.Pd., M.Si  
NIP. 199001222022031008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Burhanuddin, M.Si  
NIP: 1962091919890

**SKRIPSI**  
**ANALISIS UPAYA SHINZO ABE DALAM MENDORONG KESETARAAN  
GENDER DI JEPANG MELALUI *WOMENOMICS***

Dipersiapkan dan disusun oleh:

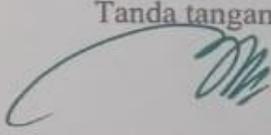
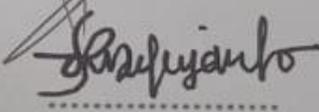
**Nama : NALVITA**

**NIM : F0220312**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada, 06 November 2024

**Susunan Dewan Penguji:**

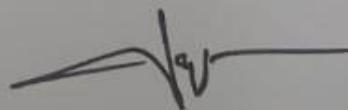
Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	 .....
2. Danar H.A Wardhana, M.Si	Penguji Utama	 .....
3. Saomi Rizqiyanto, M.Si	Penguji/Anggota	 .....

Pembimbing I

Pembimbing II



Asma Amin, S.IP., M.A  
NIP. 198807132015042005



Muhammad Sajidin, S.Pd., M.Si  
NIP. 199001222022031008

## ABSTRAK

Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dibutuhkan oleh setiap kalangan masyarakat. Akan tetapi, permasalahan ketimpangan gender masih menjadi persoalan di berbagai negara, salah satunya adalah Jepang. Ketimpangan gender yang terjadi di Jepang diakibatkan karena budaya masyarakat yang bersifat patriarki. Permasalahan tersebut menyebabkan terbatasnya ruang gerak bagi kaum perempuan dalam dunia publik. Dengan demikian, Perdana Menteri Shinzo Abe di masa pemerintahannya yang kedua tahun 2013-2020 berupaya mendorong meningkatkan kesetaraan gender bagi perempuan dengan mengadopsi sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah *Womenomics*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Shinzo Abe dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui *Womenomics* di Jepang serta mengetahui kendala Jepang dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berbasis dokumen dan berbasis internet. Jenis data sekunder dan metode penelitian kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah feminisme liberal dan konsep *Womenomics*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Jepang telah berhasil meningkatkan angka kesetaraan gender bagi kaum perempuan diluar pekerjaan domestik rumah tangga sebanyak 80% di tahun 2020. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang menghambat kesetaraan gender di Jepang dalam lingkungan kerja seperti perlakuan *matahara*, beban ganda, norma tradisional, dan wabah penyakit.

**Kata Kunci :** Jepang, Kesetaraan gender, Shinzo Abe, *Womenomics*.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu ketimpangan gender merupakan salah satu masalah tersendiri dalam dunia internasional. Dampak dari ketimpangan gender telah menimbulkan penurunan kreativitas manusia dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan gender seringkali dialami oleh perempuan dan anak perempuan yang merupakan separuh dari penduduk dunia sekaligus menjadi sumbangsih dari potensi sumberdaya manusia. Akan tetapi lingkungan masyarakat global tidak terlepas dari isu ketimpangan gender dan menghambat kemajuan sosial.<sup>1</sup>

Ketimpangan gender yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat menyebabkan perempuan dan anak perempuan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sosialnya karena jenis kelamin. Ketimpangan gender sebenarnya sudah melekat dari kisah sejarah serta adat dan kebiasaan yang diterima oleh perempuan sejak dahulu tetapi masih dirasakan sampai sekarang. Dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan dunia publik, laki-laki dan perempuan selalu diperlakukan tidak setara sehingga perempuan terus bertemu dengan kesulitan-kesulitan yang diakibatkan karena mereka hanyalah perempuan, sementara laki-laki akan diberikan keleluasan serta kesempatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Gender Inequality : A Global Issue. Future Learn. Diakses tanggal 08 Juni 2024. Dari <https://www-futurelearn-com.translate.goog/info/courses/studymelbourne/0/steps/262346?>

<sup>2</sup>*United Way NCA?*.(2022). 'What is the gender inequity'. Diakses pada tanggal 08 Juni 2024 Dari [https://unitedwaynca-org.translate.goog/blog/what-is-gender-inequity/?\\_](https://unitedwaynca-org.translate.goog/blog/what-is-gender-inequity/?_)

Secara umum, ketimpangan gender di seluruh dunia merupakan dampak yang diakibatkan karena kurangnya akses yang merata seperti kurangnya perlindungan hukum bagi kaum perempuan terhadap diskriminasi. Bukan sampai disitu, dalam lingkungan publik, perempuan juga seringkali mengalami kekerasan baik itu kekerasan seksual, kekerasan emosional serta kekerasan fisik. Hal tersebut berdampak pada semakin berkurangnya kesempatan dan daya produktivitas perempuan untuk berpartisipasi dalam rana publik seperti pekerjaan.<sup>3</sup>

Selain itu pola pikir atau kepercayaan masyarakat yang sering membandingkan antara laki-laki dan perempuan sesuai tanggung jawab yang harus diterima dalam lingkungan sosial masyarakat. Pembagian peran gender tersebut atau merupakan persepsi umum dalam kehidupan sosial yang bisa diubah kapan pun sesuai perkembangan zaman. Contoh *gender role* yang umum diakui dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini adalah menganggap bahwa sejak dulu, perempuan hanya diperkenankan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga saja, sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk bekerja di lingkungan publik.

Jika membahas mengenai ketimpangan gender, tentu tidak terlepas dari kata rasisme yaitu dalam kehidupan sosial masyarakat, memandang ras atau etnis lain sebagai kelompok masyarakat yang lebih rendah. Dalam pembahasan

---

<sup>3</sup>World Bank Study (2018):More than 1 billion women lack legal protection against domestic sexual violence, finds.The.World.Bank.dari <https://www.world.bank.org.translate.google/en/news/press-release/2018/02/01/more-than-1-billion-women-lack-legal-protection-against-domestic.sexual.violence.finds.world.bank.study?>.

mengenai isu gender dalam kalangan masyarakat seringkali menggunakan kata “kesetaraan” dan “keadilan” dengan makna yang sama. Akan tetapi pada faktanya bahwa kesetaraan dan keadilan memiliki makna yang berbeda.

Kesetaraan merupakan satu keadaan dimana setiap individu atau kelompok diberikan hak kesempatan dan peluang yang sama tanpa harus memperhatikan adanya perbedaan situasi atau tidak mempertimbangkan apa sesungguhnya yang benar-benar dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok sehingga terjadi ketidak merataan dalam pemenuhan kebutuhan. Sedangkan keadilan merupakan suatu peluang dan kesempatan yang diberikan secara adil sesuai dengan kebutuhan suatu individu maupun kelompok masyarakat. Keadilan memandang bahwa setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda sehingga cara untuk memenuhi kebutuhan dan kesempatan yang diberikan tentu akan berbeda pula sesuai dengan kondisi masing-masing<sup>4</sup>.

Kesetaraan memang memberikan kesempatan bagi setiap orang tanpa melihat perbedaan. Akan tetapi jika kesetaraan di upayakan dengan tolak ukur utamanya adalah mempraktikkan keadilan yaitu memberikan kesempatan bagi setiap orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka keadilan akan menciptakan kesetaraan yang jauh lebih tinggi dalam memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap masyarakat akan memperoleh kesempatan atau sarana dan prasarana yang berkelanjutan hingga dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya.

---

<sup>4</sup>*United Way NCA (2022): Equity vs equality what's the difference - Examples & definitions.* Diakses pada 10 juni 2024 Dari <https://unitedwaynca-org.translate.google.com/blog/equity-vs-equality>.

Jepang merupakan negara Asia Timur yang menganut budaya patriarki sejak dulu, yaitu kekuasaan didominasi oleh kaum laki-laki sedangkan perempuan tidak memiliki akses yang luas dalam bidang publik seperti hak politik, hal sosial, serta moral akibat penguasaan oleh kaum laki-laki.<sup>5</sup> Masyarakat Jepang sudah menganut budaya patriarki sejak zaman Meiji. Pemerintah Jepang bahkan mengeluarkan kebijakan untuk membangun sebuah sekolah sesuai dengan pembagian peran gender yang secara khusus mengajarkan bagaimana peran para perempuan untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, serta dapat menjadi istri yang bijak dalam mengurus rumah tangganya yang sering disebut “*good wife and good mother*”.<sup>6</sup>

Sementara kaum laki-laki diberikan keleluasan untuk berpartisipasi dalam sektor publik atau diluar pekerjaan domestik. Pendidikan tersebut memberi batasan terhadap ruang gerak perempuan di Jepang. Karena itu, di zaman Meiji terkenal dengan istilah “*man superior dan women inferior*”<sup>7</sup>.

Di zaman sebelumnya yaitu di zaman Heian 794-1185, kaum perempuan seringkali mengalami ketidak setaraan gender di kalangan masyarakat Jepang. Mereka percaya bahwa perempuan merupakan makhluk yang berdosa sejak lahir karena darah saat datang bulan dan darah saat melahirkan dianggap tidak suci sehingga status perempuan selalu diberi label yang buruk dan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Kaum perempuan hanya diperbolehkan bekerja

---

<sup>5</sup>Patriarki dan Matriarki Menurut Kacamata Islam (2021) Diakses kamis, 23 November 2023. Dari <https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/>.

<sup>6</sup>Costa Rica and El Salvador, ‘REGISTRATION : STATUS : TEXT ‘, December 1979, 2003,

<sup>7</sup>Miming Gustina, Khairil Anwar, and Rima Devi, ‘Perempuan Sebagai *The Other* Dalam Novel Kogoeru Kiba Karya Nonami Asa’, JANURA SAJA: Jurnal Program Studi Sastra Jepang, 11(2022), 23-37.

mengurus urusan rumah tangga atau urusan domestik saja dan tidak diperkenankan untuk ikut dalam peperangan karena dianggap lemah.<sup>8</sup>

Dengan adanya pembagian peran gender yang diwariskan dari waktu ke waktu yang berdampak pada era-era selanjutnya, menyebabkan perempuan Jepang terus mengalami kesenjangan dan batasan ruang gerak. Pemerintah Jepang telah melakukan beberapa kebijakan dalam merespon permasalahan ketimpangan gender yaitu penandatanganan CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) atau penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada 17 juli 1980 yang kemudian diratifikasi pada 25 juni 1985<sup>9</sup>, tujuannya adalah untuk menghapus segala sistem politik, hukum, sosial dan kebudayaan yang dianggap menghambat ruang gerak perempuan<sup>10</sup>.

Adapun implementasi CEDAW yaitu memberlakukan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, pada tahun 1986, serta membuat undang-undang tahun 1992 mengenai pemberlakuan cuti mengurus anak dan keluarga, dengan tujuan supaya ada keseimbangan antara pria dan wanita dalam hal mengurus rumahtangga dan pekerjaan. Membuat undang-undang dasar masyarakat kesetaraan gender tahun 1999 dan menetapkan dasar-dasar kesetaraan gender. Kemudian Jepang meresmikan Biro kesetaraan gender pada tahun 2001 yang bertujuan memberlakukan pria maupun wanita adalah setara

---

<sup>8</sup>Priska Sabrina Luvita, Jepang Sebagai Negara Patriarkhi  
<[https://www.academia.edu/10780259/Jepang\\_Sebagai\\_Negara\\_Patriarkhi](https://www.academia.edu/10780259/Jepang_Sebagai_Negara_Patriarkhi)>.

<sup>9</sup> Costa Rica and El Savador., Op.cit.

<sup>10</sup> M Christina Luera, 'No More Waiting for Revolution: Japan Should Take Positive Action to Implement the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women', *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, 13.3 (2004), 611

dalam hal pekerjaan maupun keluarga, dan cara memenuhi kebutuhan hidup tanpa halangan dari norma tradisional.<sup>11</sup>

Namun dari berbagai upaya yang telah dilakukan ternyata belum mencapai kesetaraan gender dengan masih minimnya partisipasi perempuan. Hal ini dibuktikan dalam indeks kesenjangan gender global tahun 2006 melaporkan bahwa Jepang berada di posisi ke 79 angka ketidak setaraan gender dari 115 negara dan merupakan negara dengan tingkat terendah diantara kelompok G7.<sup>12</sup> Kemudian di tahun 2012, Jepang menjadi peringkat ke 101 ketidak setaraan gender.

Faktor penyebab Jepang berada dalam peringkat terendah kesetaraan gender disebabkan oleh partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan bidang pekerjaan masih rendah karena didominasi oleh kaum laki-laki.<sup>13</sup> *Abenomics* merupakan sebuah istilah yang dibuat oleh Shinzo Abe pada tahun 2012 untuk kebijakan ekonomi di Jepang. Istilah *Abenomics* dibuat sebagai respon adanya stagnasi di Jepang yang sering diistilahkan dengan “*Lost Decade*”.<sup>14</sup> *Abenomics* memiliki tiga fokus utama yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Nofrelia, Eldwita, and Shobichatul Aminah. “Isu Kesenjangan Gender Pasca Abenomics: perkembangan Jumlah Pekerja Perempuan Jepang 2013-2020.” *Jurnal Hawa: Studi Pengurus Utamaan Gender dan Anak* 4.2(2022):127-137.

<sup>12</sup>Dalton Emma, “Japan’s Stubborn Gender Inequality Problem,” EASTASIAFORUM, June 28, 2022, <https://eastasiaforum-org.translate.google/2022/06/28/japans-stubborn-gender-inequality-problem/>.

<sup>13</sup>Nofrelia, Eldwita & Shobichatul Aminah., Op.Cit., hlm 2,5

<sup>14</sup>Lost Decade in Japan: History and Causes .2021. diakses 24 oktober 2023. dari <https://www.investopedia.com/terms/l/lost-decade.asp>.

<sup>15</sup> Yoshino dkk, “Three Arrows of “Abenomics” and the Structural Reform of Japan : Inflation Targeting Policy of the Central Bank, Fiscal Consolidation and Growth Strategy “. Asian development bank, Agustus 2014, diakses pada tanggal 25 november 2023. dari

Beriringan dengan *Abenomics*, Perdana Menteri Shinzo Abe pada masa pemerintahannya yang kedua juga memperkenalkan kebijakan yang disebut dengan istilah “*Womenomics*” merupakan konsep yang dibuat untuk memberikan gambaran bahwa keterlibatan atau partisipasi perempuan masuk kedalam ranah publik akan mendorong peningkatan ekonomi Jepang karena keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor akan tercipta wujud kesetaraan.<sup>16</sup> Pada tahun 1990an, sebelum lahirnya *Womenomics*, Jepang mengalami stagnasi ekonomi selama satu dekade yaitu pertumbuhan PDB perkapita Jepang hanya sekitar 0,5% pertahun yakni dari tahun 1991 sampai tahun 2000<sup>17</sup>.

## 1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah digunakan dengan tujuan membatasi penelitian agar tidak merambat ke masalah lain, dan lebih memudahkan untuk berfokus pada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus pada upaya Perdana Menteri Shinzo Abe dalam mewujudkan kesetaraan gender terhadap kaum perempuan dalam lingkungan kerja di Jepang melalui *Womenomics*. Topik penelitian ini berfokus pada tahun 2013-2020, karena pada tahun tersebut Shinzo Abe mulai mengadopsi kebijakan *Womenomics* sejak ia kembali menjabat Perdana Menteri pada periode ke dua di tahun 2012.

---

<https://www.adb-org.translate.google.com/publications/three-arrows-abenomics-and-structural-reform-japan-inflation-targeting-policy-central?>

<sup>16</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Structural Reform of the Japanese Economy: Basic Policies for Macroeconomic Management” Diakses pada 25 November 2023.  
<https://www.mofa.go.jp/policy/economy/japan/reform-m.html>

Maka, berdasarkan latar belakang diatas, inti permasalahan dalam penelitian ini yaitu menganalisis:

1. Bagaimanakah upaya Perdana Menteri Shinzo Abe dalam mendorong kesetaraan gender di Jepang Melalui *Womenomics*?
2. Bagaimanakah tantangan yang dihadapi Jepang mewujudkan kesetaraan gender pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang :

1. Upaya yang dilakukan Shinzo Abe dalam mewujudkan kesetaraan gender di Jepang melalui kebijakan *Womenomics*
2. Kendala yang dihadapi Jepang dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai pentingnya kesetaraan gender sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Selain itu diharapkan dapat menambah referensi penelitian dan sumber bacaan.

## **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis terkait bagaimana kebijakan dalam menangani masalah ketimpangan gender sebagai salah satu isu internasional. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai kebijakan Shinzo Abe yang mengupayakan kesetaraan gender, terlepas dari negara Jepang dikenal dengan budaya patriarki.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang menjabarkan fenomena yang sudah terjadi ataupun sedang berlangsung, kemudian menghasilkan data yang bersifat fakta yang kemudian nantinya menghasilkan kesimpulan yang bersifat mendetail mengenai sebuah isu, peristiwa, maupun fenomena yang diteliti. Bagi penulis, metode penelitian ini dirasa tepat dalam menjelaskan upaya Perdana Menteri Shinzo Abe dalam mendorong kesetaraan gender di Jepang.

#### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, kemudian di kumpulkan oleh penulis untuk kepentingan penelitian. Penulis menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan *Internet Searching* yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui buku, jurnal, skripsi, berita online,

website, artikel dan sumber-sumber lainnya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.4.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, berita online, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dideskripsikan dan membuat satu kesimpulan dari data tersebut dengan menggunakan teori yang sudah ada.

#### **1.4.4 Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data sekunder yang didapat dari jurnal, artikel online, berita online dan sumber-sumber lainnya, kemudian mendeskripsikan dan membuat suatu kesimpulan dari data tersebut dengan menggunakan teori yang telah ada.

#### **1.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei–oktober 2024. Penelitian ini telah dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu di perpustakaan Universitas Sulawesi Barat dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum.

#### **1.4.6 Sistematika Penyusunan**

Bab I: Pada bab ini akan berisi latar belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II: Pada bab ini akan berisi telaah konseptual, dan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan adalah teori feminisme liberal.

Bab III: Pada bab ini berisi tentang kebijakan *Womenomics* Shinzo Abe

Bab IV: Bab ini berisi pembahasan mengenai: bagaimana upaya yang sudah dilakukan Shinzo Abe untuk mendorong kesetaraan gender di Jepang melalui *Womenomics*. Serta membahas bagaimana tantangan yang dihadapi Shinzo Abe dalam mendorong kesetaraan gender di Jepang.

Bab V: Bab ini memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian, serta saran.

## **BAB II**

### **TELAAH KONSEPTUAL DAN TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Telaah Konseptual**

##### **2.1.1 Feminisme Liberal**

Definisi feminisme menurut Karen Offen dalam (Bob Suggeng Hadiwinata 2017): “ *a theory and movement concerned with advancing the position of women through such means as achievement of political, legal, and economic rights equal to granted men*”. (Feminisme sebagai suatu teori dan/atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan melalui cara-cara tertentu untuk mendapatkan hak-hak politik, hukum dan ekonomi sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki).<sup>18</sup> Feminisme adalah suatu gerakan atau emansipasi perempuan sebagai respon dari ketidakadilan peran gender.

Pada abad ke-18, gerakan feminis mulai terbentuk, dengan utamanya adalah menganjurkan transformasi berbagai bentuk penindasan yang mengarah kepada perempuan, seperti penindasan yang didasarkan pada ras, gender, kelas, dan seksualitas, perlu diatasi dan diubah. Pada intinya, feminisme menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki sifat dasarnya memiliki hak yang sama sejak lahir, dan oleh karena itu, mereka harus mempunyai kesempatan yang sama

---

<sup>18</sup> Bob Suggeng Hadiwinata, *Study dan Teori Hubungan Internasional; Arus Utama Alternatif, dan Reflektivis*, (Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia:2017), hlm.214.

dalam semua bidang kehidupan.<sup>19</sup> Feminisme merupakan gerakan yang berfokus pada peningkatan perempuan ya itu berupaya untuk memperjuangkan hak dan kesamaan anantara laki-laki dan perempuan bahwa mereka memiliki derajat yang sama tanpa terkecuali.

Menurut Yoman Kutha Ratna, dalam (Yeyen Subandi 2021), feminisme adalah gerakan untuk menolak segala sesuatu yang memarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kaum dominan (maskulin) dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ratna menganggap bahwa pada dasarnya, feminisme bertujuan untuk menciptakan keseimbangan relasi gender. Menurutnya, feminisme berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sehingga memperoleh kedudukan serta kesempatan yang sama dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Selain bertujuan menciptakan keadilan serta kesetaraan gender, gerakan feminisme juga sebagai salah satu jalan keluar dalam mencapai pembangunan internasional. Dengan adanya gerakan feminisme, dapat mejadi pendorong bagi kaum feminis dalam mengembangkan potensi diri tanpa merasa terkucilkan atau berperan sebagai kaum marjinal ditengah-tengah kaum laki-laki (maskulin). Feminisme berupaya memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan untuk tidak hanya bekerja dalam lingkungan domestik rumahtangga

---

<sup>19</sup> Pijar Maulid, "Analisis Feminisme Liberal terhadap Konsep Pendidikan Perempuan", Jurnal Riset Agama, Vol 2 No.2 (Agustus 2022), 603

<sup>20</sup> Subandi Yeyen. (2021). Gender dan Hubungan Internasional. Lombok Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri.

saja tetapi juga diberikan hak dan kesamaan untuk berpartisipasi dalam dunia publik.<sup>21</sup>

Dalam perkembangannya, feminisme bertumbuh disertai dengan lahirnya berbagai macam aliran feminisme. Salah satunya adalah aliran feminisme liberal yang merupakan aliran feminisme pertama yang berkembang sejak abad ke 18. Feminism liberal pertamakali dipelopori oleh Marry Wolstonecraft pada abad ke 18, Jhon Stuart Mill dan Helen Taylor pada abad ke 19 dan Betty Frieden abad ke 20.<sup>22</sup>

Sebagai pelopor pertama feminisme liberal, dalam bukunya yang berjudul “*A Vindication of the Right of Women*”, Wolstonecraft mengemukakan bahwa pendidikan, pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan hidup harus sama antar manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan kritik terhadap pendapat Jean Jackques Rosseau dalam novelnya yang membedakan pendidikan anantara laki-laki dan perempuan dimana pendidikan yang harus diterima laki-laki adalah pendidikan yang bersifat rasional, dan menyeluruh sebagai bekal untuk bekerja dalam dunia publik. Sementara perempuan diberikan pendidikan seni dengan harapan akan memiliki sifat pengertian, perhatian dan lebih menguasai peran sebagai ibu yang berekerja di lingkungan domestik rumah tangga.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Anjani, Sheila. (2019, Januari 22). Gender Inequality dan Liberal Feminism. Binus Univercity. Diakses pada selasa 30 juli 2024. <https://communication.binus.ac.id/2019/01/22/gender-inequality-dan-liberal-feminism/>

<sup>22</sup> Feminisme Liberal. (2012). *Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro*. Diakses pada 1 Agustus 2024, dari <https://asppuk.or.id/2012/04/feminism-liberal/>

<sup>23</sup> *Ibid.*

Wollstoncraf beranggapan bahwa setiap manusia diciptakan sama, karena itu, laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Wollstoncraft menentang stereotip dalam masyarakat yang memandang kondisi alamiah perempuan adalah penyebab kurang intelektualitas. Perempuan juga mampu untuk mengembangkan potensi diri jika mendapatkan pendidikan sama seperti yang di terima laki-laki.

Pada abad ke 19, J.S Mill dan Harriet Taylor juga menemukan pendapatnya mengenai gerakan perempuan yang searah dengan Wollstoncraft yaitu selain jenis pendidikan antara laki-laki dan perempuan harus sama, kesempatan dalam perekonomian dan hak sebagai warga sipil juga harus terwujud satu sama lain baik laki-laki maupun perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan juga bisa superior sama seperti laki-laki asalkan mendapatkan bentuk pendidikan yang sama.<sup>24</sup> Berbeda dengan gerakan perempuan menurut Betty Friedan, ia mengkritik pemikiran Wollstoncraft, Mill dan Harriet Taylor yang hanya memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam dunia publik tanpa mengajak kaum laki-laki untuk juga berpartisipasi dalam pekerjaan domestik rumah tangga.

Betty Frieden sebagai pelopor feminisme liberal pada abad ke 20 melihat bahwa kaum perempuan mengalami sulitnya berperan ganda jika harus mengejar karir di dunia publik yang beriringan dengan tanggung jawab dalam mengurus urusan domestik rumah tangga. Frieden mengajak kaum perempuan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

untuk bergerak mengubah pola atau pemikiran yang diciptakan masyarakat terhadap perempuan yang memiliki keterbatasan, mengajak perempuan untuk bekerjasama dengan laki-laki dalam mengubah pemikiran masyarakat dalam dunia publik. Laki-laki maupun perempuan harus memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama dalam dunia publik, urusan domestik rumahtangga, dan mengurus anak-anak.<sup>25</sup>

Peran gender yang tercipta dalam masyarakat yang memandang bahwa apa yang dimiliki oleh laki-laki tidak akan dimiliki oleh perempuan, dimana laki-laki di identikkan dengan fisik yang kuat, pemikiran yang rasional dan dianggap aktif. Berbeda dengan sifat perempuan yang lemah, berpikir emosional, dan di anggap pasif. Dengan melihat stereotip yang diciptakan masyarakat, menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia publik maupun kehidupan sosial budaya, sehingga arah dari gerakan feminisme liberal adalah ingin mengubah pandangan masyarakat dan mengharapkan perempuan dapat terbebas dari peran gender yang bersifat absolut.

Feminisme Liberal merupakan sebuah pandangan yang mendorong perempuan supaya memiliki kebebasan penuh secara individu dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Aliran ini berupaya memberikan pemahaman terhadap perempuan mengenai posisinya yang hanya sebatas dalam lingkungan pekerjaan domestik, tidak menempatkannya pada posisi yang dianggap

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

produktif, melainkan berada pada posisi yang hanya bisa menuruti pihak lain dan memiliki kedudukan yang berbeda atau lebih rendah.<sup>26</sup>

Fokus utama perspektif feminisme liberal terletak pada penyelesaian isu ketidakadilan gender dalam ranah kekuasaan global dan hubungan internasional. Perspektif ini mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam lingkungan publik dan menentang keterbatasan yang ada pada perempuan di arena global.<sup>27</sup> Melalui perspektif feminisme liberal, setiap negara di dunia diharapkan untuk dapat berperan penting dalam membuat keputusan dan kebijakan yang dapat memastikan tidak ada lagi bentuk diskriminasi dalam pekerjaan.

Di Jepang, Gerakan feminisme liberal telah diterapkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2013 melalui sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah *Womenomics*. Shinzo Abe berupaya meyarakan kebebasan dan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia publik sama seperti kaum laki-laki yaitu: **Pertama**, mendorong partisipasi perempuan diluar pekerjaan domestik rumah tangga, dimana dalam lingkungan pekerjaan atau karir, perempuan diberikan kebebasan untuk mengembangkan sumberdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

**Kedua**, mendorong perempuan untuk kembali bekerja setelah melahirkan. Dalam penerapannya, tidak hanya mengupayakan kaum

---

<sup>26</sup> Gramedia Blog (Apa itu feminisme? Ketahuilah Segala hal pentingnya!' diakses pada tanggal 2 November 2024. Dari [www.gramedia.com./literasi/feminisme](http://www.gramedia.com./literasi/feminisme)

<sup>27</sup> Subandi Yeyen, OP.cit., hal. 7,8

perempuan untuk masuk dalam ranah pekerjaan, akan tetapi mendorong juga kaum laki-laki untuk berpartisipasi dalam lingkungan domestik yang bertujuan agar perempuan tidak menerima beban ganda, sesuai dengan kritik Betty Frieden, pelopor feminisme liberal abad ke 20. Yang *ketiga*, peningkatan pekerja perempuan pada posisi kepemimpinan.

Kebijakan ini bertujuan mengubah stereotip yang berkembang di masyarakat yang memandang bahwa kondisi alamiah yang dimiliki perempuan menjadikan dirinya kurang intelektualitas. Hal ini sesuai kritik dari Wollstonecraft sebagai pelopor feminisme liberal yang beranggapan bahwa setiap manusia diciptakan sama. Laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama untuk mengembangkan dirinya asal mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama.

### **2.1.2 Womenomics**

*Womenomics* merupakan konsep yang dibuat untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis pada kesetaraan gender dimana ketimpangan gender adalah permasalahan utama dalam menurunnya perekonomian perempuan di suatu negara. Istilah *Womenomics* merupakan konsep yang dikemukakan oleh Kathy Matsui untuk pertama kalinya di Jepang pada tahun 1999, seorang ahli strategi *Goldman Sachs* bersama dengan kedua rekannya Hiromi Suzuki dan Yoko Ushio.<sup>28</sup> Konsep *Womenomics* dibuat sebagai respon

---

<sup>28</sup> Selvy Marlina Anggun P, *Analisis Dampak Womenomics Terhadap Kesetaraan Gender Perempuan Jepang Sesudah Masa Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe (2020-2022)*, (Jakarta: UNSADA, 2023), Hal.12

dari rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja tahun 1990-an hanya berjumlah 56% menurut OECD (*The Organisation for Economic Cooperation and Development*) dan menjadi yang terendah di antara negara-negara maju.<sup>29</sup>

Konsep *Womenomics* menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kesetaraan dalam setiap aspek untuk menunjang peningkatan ekonomi negara terutama untuk memberikan kesempatan bagi perempuan Jepang dalam memenuhi kebutuhan hidup, dengan cara mendukung partisipasi perempuan dalam lingkungan pekerjaan. Masalah ketimpangan gender di Jepang sudah termasuk dalam isu global sehingga mendapat kritikan dari PBB. Oleh karena itu, Perdana Menteri Shinzo Abe mengupayakan kesetaraan gender tersebut terwujud dengan baik.

Satu upaya Perdana Menteri Shinzo Abe yang terkenal adalah dengan melakukan pengadopsian konsep *Womenomics*. *Womenomics* yang di sah kan pada sidang umum PBB tahun 2013, selain beroperasi secara internal, konsep ini juga di perkenalkan PM Shinzo Abe sebagai kebijakan luar negeri Jepang untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan di negara-negara berkembang.<sup>30</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan

---

<sup>29</sup> Spotlight on Japan, “Japan Introduces “*Womenomics*” to Counter the Country’s Aging Workforce and boost GDP”. Diakses pada tanggal 15 september 2024. Dari <https://www-cfr>

<sup>30</sup> United Nations, (2013), “Japanese Leader Advocates ‘*Womenomics*’ in address to UN General Assembly”. Diakses pada tanggal 19 September 2024. Dari <https://news.un.org/en/story/2013/09/450912>.

kesetaraan gender melalui konsep *Womenomics* merupakan suatu kebijakan yang diupayakan secara luas oleh PM Shinzo Abe.

## 2.2 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan karya ini, penulis mengumpulkan informasi dari penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu dan dijabarkan poin letak perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Yang pertama, Sebuah buku yang berjudul “Gender dan Hubungan Internasional” ditulis oleh Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A. buku ini berisi pembahasan mengenai isu-isu gender yang menjadi perdebatan di kalangan eropa, membahas keterkaitan gender dalam hubungan internasional, membahas awal mula kemunculan gerakan yang menentang pandangan-pandangan yang memarjinalkan pihak lain, yaitu membahas paham feminisme dan turunannya yang berubah dan berkembang dari masa-ke masa seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme radikal libertarian, feminisme marxis dan berbagai turunannya.<sup>31</sup>

Yang kedua artikel penelitian oleh Kathy Matsui pada tahun 2014.<sup>32</sup> Dimana dalam penelitian ini, Matsui membuat rancangan atau *progres* sebagai awal kebijakan *Womenomics* diberlakukan dalam meningkatkan kesetaraan gender. Matsui menekankan bahwa upaya dalam meningkatkan kesetaraan gender akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil pada generasi selanjutnya. Matsui menjelaskan bahwa kebijakan peningkatan kesetaraan gender memang

---

<sup>31</sup> Subandi Yeyen., Op.cit. hlm 13

<sup>32</sup> Kathy Matsui, “Womenomics 4.0: Time to Walk the Talk”, Goldman Sach, Edisi 30 Mei 2014

magalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi perubahan dan penambahan implementasi kebijakan juga perlu dilakukan agar lebih maksimal seperti peningkatan angka kerja perempuan,

Yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Afifah Mizhari pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Internalisasi Norma Kesetaraan Gender Periode 1990-2017 di Jepang”.<sup>33</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afifah membahas proses pemberlakuan norma kesetaraan gender di Jepang dimana yang telah diketahui bahwa Jepang merupakan negara yang kental dengan budaya patriarki namun tetap berupaya menciptakan norma kesetaraan gender. Dalam penerapannya, penelitian ini juga berpatokan pada kebijakan *Womenomics* mulai yang data-datanya di kumpulkan sejak awal istilah *Womenomics* diciptakan oleh Kathy matsui hingga di adopsi oleh Shinzo Abe pada pemerintahannya yang ke dua yakni data-data dari tahun 1990 hingga 2017.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa norma kesetaraan gender telah berhasil disebarkan di Jepang melalui PBB namun juga menemukan hambatan-hambatan dimana kebijakan norma kesetaraan gender yang ada, kadang tidak disetujui oleh masyarakat Jepang sendiri. Dari penelitian yang dilakukan Afifah, tentu akan dapat membantu penelitian saya karena arahnya hampir sama membahas norma kesetaraan gender melalui *Womenomics*. Selain itu, data data terdahulu dalam penelitian akan berkesinambungan dengan kebutuhan penelitian yang saya lakukan.

---

<sup>33</sup> Afifah Mizhari, “Analisis Internalisasi Norma Kesetaraan Gender Periode 1990-2017 di Jepang”. Bandung : 2018.

Yang keempat, skripsi yang ditulis oleh Nathania Yunita Dharma pada tahun 2022 dengan judul, “Implementasi Womenomics dalam Politik Domestik Jepang : Transformasi Peran Perempuan pada Era Perdana Menteri Shinzo Abe.”<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, membahas kesetaraan gender di Jepang yang berada pada titik terendah sehingga perdana Menteri Shinzo Abe mengambil langkah yang mendesak dan menjadikan isu ini sebagai prioritas utama di Jepang pada periode kedua pemerintahannya yakni tahun 2012. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kaum perempuan mengalami keterbatasan untuk berpartisipasi dalam ranah politik sehingga PM Shinzo Abe kemudian memperkenalkan sebuah kebijakan yang disebut dengan “*Womenomics*”, yaitu sebuah strategi kebijakan yang dibuat untuk berfokus pada gender sesuai dengan agenda dalam *Abenomics* yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Shinzo Abe pada periode kedua pemerintahannya yang berfokus pada Strategi *Womenomics* dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan di dunia politik.

Dari penelitian sebelumnya membahas penekanan dari masalah ketimpangan gender yang sebenarnya sudah lama menjadi persoalan di Jepang sehingga berbagai upaya pula telah dilakukan sejak dulu untuk mengupayakan kesetaraan gender. Dari literatur sebelumnya, sama-sama membahas *Womenomics* sebagai kebijakan mengupayakan kesetaraan gender mulai dari *womenomics* pertamakali hadir di tahun 1990 melalui ide Kathy Matsui, hingga di adopsi oleh PM Shinzo Abe pada awal periode yang kedua, tahun 2013. Sama dengan penelitian

---

<sup>34</sup> Nathania Yunita Dharma, “*Implementasi womenomics dalam politik domestik di Jepang: Transformasi peran perempuan pada era perdana Menteri Shinzo Abe* “. Bandung : 2022. Hal 1 dan 23

sebelumnya, dalam karya tulis ini, penulis juga membahas kebijakan *Womenomics*, akan tetapi tahun penelitian yang penulis lakukan berbeda, yaitu secara luas lebih berfokus pada tahun-tahun pemerintahan PM Shinzo Abe tahun 2013 hingga 2020 sebagai tahun awal pengadopsian *Womenomics* hingga tahun kemunduruan Shinzo Abe dari jabatan PM Jepang.

Selain dari pada itu, dengan melihat literatur sebelumnya yang fokus kebijakan *Womenomics* nya dalam dunia politik, penulis hendak melakukan penelitian yang berbeda dimana fokus utama *Womenomics* adalah kebijakan dalam mendorong kesetaraan gender terhadap perempuan dengan berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian, penulis juga membahas partisipasi Jepang secara internasional melalui kebijakan *Womenomics* berbeda dengan penelitian sebelumnya, hanya membahas kebijakan *Womenomics* dalam lingkup masyarakat Jepang saja. Kemudian yang terakhir, penelitian ini juga sedikit membahas tantangan apa saja yang menghalangi penerapan *womenomics* di Jepang.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Upaya Perdana Menteri Shinzo Abe dalam mendorong kesetaraan gender di Jepang tidak terlepas dari konsep *Womenomic* yang telah diadopsi Abe pada tahun 2013. Sejak menjabat pada periode kedua pemerintahannya, Shinzo Abe melalui konsep *Womenomics*, memasang target yang harus dicapai pada tahun 2020 mengenai peningkatan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam dunia pekerjaan. Adapun hasil kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. PM Shinzo Abe menerapkan kebijakan *Act of Promotion of Women's Participation and Advicement in the Workplace* yang di sah kan dalam Undang-Undang No 64 tahun 2015. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong keberhasilan konsep *Womenomics*, dalam mencapai tujuannya. *Act of Promotion of Women's Participation and Advicement in the Workplace*, dalam penerapannya memanfaatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi mulai dari kementerian tingkat pusat, kementerian tingkat daerah, hingga sektor swasta. Melalui *Act of Promotion of Women's Participation and Advicement in the Workplace*, Jepang telah berhasil mendorong partisipasi perempuan diluar pekerjaan domestik rumah tangga mencapai 80% di tahun 2020 melampaui target sebelumnya.

Selain itu, Perdana Menteri Shinzo Abe juga mendorong perempuan untuk kembali bekerja setelah melahirkan dengan melakukan upaya peningkatan fasilitas penitipan anak, pemberian hak cuti melahirkan bagi ayah, dan mengurangi jam kerja yang panjang bagi perusahaan-perusahaan di Jepang.

Akan tetapi upaya ini tidak berjalan dengan maksimal. Terhitung di tahun 2020. Jumlah anak yang masuk dalam daftar tunggu penitipan anak meningkat menjadi 28.000, hanya 6% ayah yang menerapkan cuti melahirkan itupun sebagian dari mereka yang menerapkan cuti hanya kurang dari seminggu dan jauh dari target 13% yang ditetapkan *Womenomics*.

Selain itu, kebijakan PM Shinzo Abe juga menargetkan peningkatan perempuan pada posisi kepemimpinan pada tahun 2020, akan tetapi target ini tidak tercapai. Di Jepang, perempuan hanya mampu memperoleh 7,8% posisi managerial di tahun 2019 dan 8% di tahun 2020. masih jauh dari target 30% yang ditentukan dalam program *Womenomics*.

2. Tantangan terwujudnya *Womenomics* di masa pemerintahan Shinzo Abe, yang adalah; pertama, adanya istilah *Matahara* atau sebuah bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam lingkungan kerja ketika hamil dan saat memasuki lingkungan kerja setelah cuti melahirkan. Kedua, upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, justru menimbulkan, beban ganda yang dialami oleh pekerja perempuan. Ketiga, masa Pandemi COVID 19 menyebabkan perempuan mengalami pemutusan kerja akibat lapangan pekerjaan yang mendominasi pekerja perempuan, seperti perhotelan, pariwisata dan tempat penitipan anak, ditutup akibat kebijakan *lockdown*. Keempat, penghambat peningkatan kesetaraan gender, diakibatkan oleh norma tradisional Jepang yang masih menganut budaya patriarki.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya Perdana Menteri Shinzo Abe dalam mendorong kesetaraan gender di Jepang melalui *Womenomics*, yang berfokus pada tahun 2013 hingga 2020, sebenarnya sudah ada target yang tercapai dengan baik seperti upaya peningkatan perempuan untuk berpartisipasi diluar pekerjaan domestik rumah tangga mencapai 80% di tahun 2020. Akan tetapi target peningkatan posisi perempuan pada kepemimpinan mencapai 30% di tahun 2020 tidak berhasil dengan baik, yaitu hanya mencapai 8% di tahun 2020.

Akan tetapi pencapaian target 30% perempuan di posisi kepemimpinan di undur ke tahun 2030. Karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti perkembangan target posisi kepemimpinan perempuan menjadi 30% di tahun 2030 dengan menggunakan konsep sesuai dengan kebijakan pemerintahan baru di Jepang setelah PM Shinzo Abe.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wollstonecraft, M. (2014). *A Vindication of the Right of Women*. Yale University.

World Economic Forum, *Insight Report: The Global Gender Gap Report 2018*, [Book], 2018

### SUMBER SKRIPSI

Saputra, A., ‘*WOMENOMICS SEBAGAI MEKANISME PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI JEPANG: Studi Kasus Kebijakan Pro-Gender Di Era Pemerintahan Shinzo Abe Periode Ke-2*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.’, 2016, pp.

Dharma, Nathania Yunita, “*Implementasi womenomics dalam politik domestik di Jepang: Transformasi peran perempuan pada era perdana Menteri Shinzo Abe* “ Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Sulawesi Barat,. Bandung : 2022, pp.

Afifah Mizhari, “*Analisis Internalisasi Norma Kesetaraan Gender Periode 1990-2017 di Jepang*”. Bandung : 2018.

## SUMBER JURNAL

- Dehars, Rizky Aurelia Putri, 'Matahara Dan Patahara: Tantangan Hak Cuti Mengurus Anak Dalam Budaya Korporasi Jepang', *Izumi*, 12.2 (2023), pp. 183–92, doi:10.14710/izumi.12.2.183-192
- Dharma, Nathania Yunita, Triesanto Romulo Simanjuntak, and Putri Hergianasari, 'Womenomics and Japan's Domestic Politics: The Transformation of Women Roles in the Shinzo Abe Administration', *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12.2 (2023), pp. 219–43, doi:10.15575/jispo.v12i2.21177
- Elsy, 'Fenomena Tenaga Kerja Asing Di Jepang Dewasa Ini', 6.June 2018 (2018), pp. 1–18
- Facts, I, '■ Proportion of Full-Time Workers Working 60 Hours or More per Week', 2018, pp. 11–12
- Karo, Mayang Terapulina, Ihsan Hikmatullah, Dwi Maudyta Puteri, Nada Qotrun Aulia, and Nur Safa Shafira, 'Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe', *Jurnal Transborders*, 4.2 (2021), pp. 96–110
- Kasih, Osihanna Meita, Yuni Amanda, Hannatrie Syalsabillah, Sefrina Linda, Adilla Putri, Angelica Nathaniella, and others, 'Diskriminasi Gender Dan Tindakan Asusila Terhadap Wanita Dalam Dunia Pekerjaan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2024), pp. 281–91
- Luh, Ni, and Putu Ari, 'Ujaran Seksisme Yoshiro Mori : Persoalan Stereotip Gender Pada Olimpiade Ujaran Seksisme Yoshiro Mori : Persoalan Stereotip Gender Pada Olimpiade Tokyo', December 2021, 2022, doi:10.14710/kiryoku.v5i2.265-271
- Muhammad Praja Wibawa, rini arfianti: " Pengaruh demografi dan kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Depopulasi Negara Jepang Selama 2 dekade

terakhir”, *Journal Transborders*, Vol. 7 No. 2 (Juni 2024) | P-ISSN: 2598-7399  
&E-ISSN: 2598-9200

Pangastoeti, Sri. Wibowo, Robi. Wardoyo, Stedi. Anggraeni, julia. Nugraha, Ardania. Umar, Muhammad, *Dalam Bayangan Pandemi : Narasi Kehidupan WNI Di Jepang Selama Covid-19* (Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2021)

Rica, Costa, H S Hg, El Salvador, and Saint Lucia, ‘Women in Politics : 2012’, January, 2012, p. 2012

SHIKATA, Yumi, ‘The Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in Japanese Media’, *Trends in the Sciences*, 22.8 (2017), pp. 8\_74-8\_79, doi:10.5363/tits.22.8\_74

Shioiri, Tetsuya, ‘The Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the Workplace’, *Journal of the Japanese Association for Petroleum Technology*, 82.2 (2017), pp. 111–16, doi:10.3720/japt.82.111

Stange, Mary, Carol Oyster, and Jane Sloan, *World Economic Forum Global Gender Gap Report (2005)*, *The Multimedia Encyclopedia of Women in Today’s World Encyclopedia of Women in Today’s World*, 2013, doi:10.4135/9781452270388.n478

Tiara, Ayu, Karel Bua’, Reni Windiani, Ji H Soedarto, S H Tembalang, and Kota Semarang Kotak, ‘Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Gender Mainstreaming Dalam Implementasi Womenomics’, *Journal of International Relations*, 9.1 (2023), pp. 138–54

World Economic Forum, *Global Gender Gap 2024. Insight Report*, 2024

———, *Insight Report: The Global Gender Gap Report 2018*, [Book], 2018

## **SUMBER ARTIKEL**

Kathy Matsui, “Womenomics 4.0: Time to Walk the Talk”, Goldman Sach, Edisi 30 Mei 2014

## **SUMBER WEBSITE**

Anjani, Sheila. (2019, Januari 22). Gender Inequality dan Liberal Feminism. Binus Univercity. Diakses pada Selasa 30 Juli 2024.  
<https://communication.binus.ac.id/2019/01/22/gender-inequality-dan-liberal-feminism/>

BBC NEWS(2020): ‘ Virus Corona: Sekolah di Jepang dibubarkan dan kasus baru di Timur Tengah, WHO sebut wabah di ‘titik yang menentukan’. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2024. Dari  
<https://www.bbc.com/Indonesia/dunia-51668422>

BBC NEWS (2021): ‘*Mengapa Ketimpangan Gender dan Seksisme di Jepang Sulit Diatasi?*’. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2024. Dari  
<https://www.bbc.com/indonesia//vert-cap-56743670>.

Childcare Canada (2017): ‘prime minister Abe unveils government push to solve day care crunch’. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024. Dari  
[https://childcarecanada-org.translate.google.com/child-care-news/17/06/prime-minister-abe-unveils-government-push-solve-day-care-crunch?](https://childcarecanada-org.translate.google.com/child-care-news/17/06/prime-minister-abe-unveils-government-push-solve-day-care-crunch?hl=id)

CEIC (2024) : ‘Japan Population’. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024. Dari  
<https://www.ceicdata.com/id/indicator/japan/population>.

CHUBB (2023): ‘Waspada Fenomena Karoshi, Bekerja Berlebihan Menyebabkan Kematian. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2024. Dari  
<https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/fenomena-karoshi-di-jepang-html>

Dalton Emma, “Japan’s Stubborn Gender Inequality Problem,” EASTASIAFORUM, June 28, 2022, <https://eastasiaforum->

org.translate.google/2022/06/28/japans-stubborn-gender-inequality-problem/?.

Detikfinance/Berita Ekonomi Bisnis (2021): 'Persentase Pekerja Perempuan Jepang Kalah AS dan Eropa. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2024. Dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5486517/persentase-pekerja-perempuan-di-jepang-kalahkan-as-dan-eropa->.

Feminisme Liberal. (2012). *Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro*. Diakses pada 1 Agustus 2024, dari <https://asppuk.or.id/2012/04/feminism-liberal/>

Glosarium, "Abenomics" diakses pada tanggal 11 september 2024. Dari <https.co.id/glosarium/a/Abenomics>

Gender Inequality : A Global Issue. Future Learn. Diakses tanggal 08 Juni 2024. Dari <https://www.futurelearn-com.translate.google/info/courses/studymelbourne/0/steps/262346?>

Global Business Network INC (2022): '*Ketentuan Jam Kerja di Jepang*'. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024. Dari <https://www.gbni.co.jp/recipe/ketentuan-jam-kerja-di-jepang/>.

Intisari (2019). 'Jika angka kelahiran di Indonesia mencapai 5 juta anak per tahunnya, Bayi lahir di negara ini tidak sampai 1 juta per tahun, ancaman hilangnya populasi warga negara ini Miris!'. Diakses pada tanggal 08 Oktber 2024. Dari <https://intisari.grid.id/read/031967932/jika-angka-kelahiran-di-indonesia-mencapai-5-juta-anak-per-tahunnya-bayi-lahir-di-negara-ini-tidak-sampai-1-juta-per-tahun-ancaman-hilangnya-populasi-warga-negara>.

Internasional (2024): 'Negara dengan Jam Kerja Terpanjang di Dunia'. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024. Dari

<https://www.rri.co.id/internasional/981288/negara-dengan-jam-kerja-terpanjang-di-dunia#>

Japan Petroleum Exploration (2021): ‘JAPEX recognized the Certification “Eruboshi” based on the Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the Workplace’. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2024. Dari <https://www-japex-co-jp.translate.goog/en/news/detail20210309-01>

Japan Official Development Assistance: ‘Falsafah Bantuan Jepang – Piagam Official Development Assistance (ODA) Jepang (telah direvisi atas keputusan Kabinet pada tanggal 02 Agustus 2003)’. Diakses pada tanggal 29 September 2024. Dari [https://www.id.emb-Japan.go.jp/oda/id/whatisoda\\_05.htm](https://www.id.emb-Japan.go.jp/oda/id/whatisoda_05.htm).

Lost Decade in Japan: History and Causes .2021. diakses 24 ovember 2023. Dari <https://www.investopedia.com/terms/l/lost-decade.asp>

Kezia Severina (2022), ‘ Ketidak Setaraan Gender di tempat kerja di jepang dan Indonesia perbedaan upah gender dan Glass Ceiling’. Kompasiana. Diakses pada tanggal 08 November 2024. Dari <https://www.kompasiana.com.keziaeverina3627>.

Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Structural Reform of the Japanese Economy: Basic Policies for Macroeconomic Management”. Diakses pada 25 November 2023. <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/japan/reform-m.html>

Mark Crawford, “ Abe’s Womenomics Policy, 2013-2020: Tokenism, Gradualism, Or Failed Strategy?”. Diakses pada tanggal 16 septemer 2024. Dari <https://apjff.org.translate.goog/2021/4/crawford>

Mainichi Japan (2020). 'Japan gov't to push back 30% target for women in leadership positions by up to 10 years'. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024. Dari <https://mainichi.jp/english/articles/20200626/p2a/00m/0fp/014000c>

Media Indonesia (2021) : "Mengenal Mieko Kawakami, Penulis dan Aktivist Perempuan asal Jepang". Diakses pada tanggal 1 November 2024. Dari <https://mediaindonesia.com/weekend/392838/mengenal-mieko-kawakami-penulis-dan-aktivis-perempuan-asal-jepang>.

Naoko Kutty (2023): 'What is the unexplained wage gap and how can we close it?'. Diakses pada tanggal 08 November 2024. Dari <https://www.weforum/2023/11/gender-wage-gap-japan>

National Institutes of Health (2023). '*COVID-19 and the employment gender gap in Japan*'. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2024. Dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9995392/>.

Patriarki dan Matriarki Menurut Kacamata Islam (2021) Diakses kamis, 23 November 2023. Dari <https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/>.

Reuters (2020) : '*Japan Minister Koizumi to take Paternity Leave, aims to be role model*'. Dakses pada tanggal 07 Oktober 2024 Dari <https://www.reuters.com/article/world/japan-miniser-koizumi-to-take-paternity-leave-aims-to-be-role-model-idUSKBN1ZE04A/>.

Rizqi Nurtyas Sri Wikanti (2022): 'Perempuan Inspiratif Jepang'. (beautynesia). Diakses pada 1 november 2024. Dari <https://www.beautynesia.id/lfe/perempuan-inspiratif-dari-jepang262459>.

Spotlight on Japan, “ Japan Introduces “*Womenomics*” to Counter the Country’s Aging Workforce and boost GDP”. Diakses pada tanggal 15 september 2024. Dari <https://www-cfr>

Sylff Association (2024). ‘Wpmen’s Empowerment in Japan: From Tokenism to Critical Mass’. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024. Dari [https://www.sylff.org/news\\_voices/31754](https://www.sylff.org/news_voices/31754)

The Jakarta Post(2017): ‘*Families worry about lingering daycare shortage in Japan*’. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024. Dari <https://www.thejakartapost.com/life/2027/08/14/families-worry-about-lingering-daycare-shortage-in-japan.html>

TOKHIMO (2023): ‘*Finding Daycare Guide for Working Parents in Japan*’. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024. Dari <https://www.tokhimo.com/post//finding-daycare-guide-for-working-parents-in-japan-1>

TOKHIMO (2023): ‘*Maternity, Paternity, and Childcare Leave in Japan*’. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2024. Dari <https://www.tokhimo.com/post/mathernity-paternity-and-childcare-leave-in-japan-1>.

Tantri Dewayani, “*Kartini dan Kesetaraan Gender. No One Left Behind*” Diakses pada tanggal 22 agustus 2024. Dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13859/Kartini-dan-Kesetaraan-Gender-No-One-Left-Behind>.

TitipJepang (2023): ‘*Masih Membumi, Belenggu Patriarki di Jepang Harus Diatasi*’. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2024. Dari <https://titipjepang.com/budaya/belenggu-patriarki-di-jepang/>.



Yamaha Make Waves (2024) : ‘ESG Ratings and Inclusion in Indexes’. Diakses pada tanggal 02 oktober 2024. Dari <https://www.yamaha.com/en/sustainability/related-information>

Yoshino dkk, “Three Arrows of “Abenomics” and the Structural Reform of Japan : Inflation Targeting Policy of the Central Bank, Fiscal Consolidation and Growth Strategy “. Asian development bank, Agustus 2014, diakses pada tanggal 25 november 2023. dari <https://www-adb-org.translate.google.com/publications/three-arrows-abenomics-andstructural-reform-japan-inflation-targeting-policy-central/>?

#### **SUMBER YOUTUBE**

MOFA. (24 September 2014). *To Make Women Shine: Japan Efforts in Developing Countries*. [Video]. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024. Dari YouTube. <https://youtu.be/V-BiykfLIWg?si=14LsqBm7riTCwzzW> Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024